

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Hasil Wawancara dengan ibu Krisseptiana

3.1.1 Awal Karir Suami

Sebelum pak Hendi mencalonkan diri, pak Hendi bekerja sebagai wiraswasta dan bu Tia sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut penulis ketahui ketika melakukan wawancara dengan bu Tia, beliau berkata:

“Awal karir sebagai wakil walikota ya, waktu itu saya ibu rumah tangga e tidak bekerja walaupun sebelumnya saya bekerja, tetapi di 2007 saya keluar dari kerja dengan pertimbangan anak sudah besar-besar sehingga e sejak 2007 aku jadi ibu rumah tangga dengan aktivitas biasa seperti berumah tangga. Kalau dulu e saya kerja di bank Pak Hendi, wiraswasta jadi sama-sama sibuk tapi ya harus menyesuaikan karena dari awal pernikahan itu kan saya sudah kerja, pak Hendi juga sudah jadi wiraswasta. Jadi ya sudah harus tetap menyesuaikan dan juga dengan adanya 3 orang anak nih harus menyesuaikan selalu.”

Dari pernyataan bu Tia tersebut, dapat dikatakan bahwa sebelum pak Hendi menjabat sebagai wakil walikota, bu Tia bekerja di salah satu bank. Selain itu beliau juga memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Kemudian pada tahun 2007 bu Tia memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga, karena pertimbangan ketiga anak-anak beliau yang sudah semakin besar. Pada saat yang sama, pak Hendi bekerja sebagai wiraswasta, menurut jawaban bu Tia dalam wawancara penulis dengan beliau, penulis dapat menyimpulkan bahwa bu Tia dan pak Hendi adalah dua orang yang sibuk.

Ketika suaminya mulai menjabat sebagai wakil walikota, bu Tia harus menyesuaikan diri dengan peran yang baru pertama kali bu Tia duduki, yaitu sebagai istri kepala daerah, yang mana peran tersebut memiliki tanggung jawab sosial dan publik. Beliau mengakui bahwa masa transisi ini tidak mudah,

terutama karena tuntutan untuk menghadiri kegiatan resmi dan berinteraksi dengan banyak orang. Seperti yang beliau ungkapkan:

“Menyesuaikan gitu ya, bertemu dengan banyak orang, kemudian harus sambutan. Itu diatur sama protokol waktu kegiatan. Jadi butuh pembelajaran yang sangat luar semua biasa. Pembelajaran itu tidak didapat dari sekolah, tapi dari pengalaman.”

Pernyataan tersebut menggambarkan proses *learning by doing* dalam membentuk identitas baru sebagai figur publik. Bu Tia juga menambahkan bahwa tuntutan emosional menjadi bagian dari penyesuaian tersebut:

“Sakit enggak boleh tampak sakit, sedih enggak boleh tambah sedih. Harus tampak selalu sehat dan bahagia.”

Kutipan tersebut menunjukkan dimensi *soft power* seorang istri kepala daerah, di mana citra dan ekspresi diri menjadi bagian dari komunikasi politik non-verbal seperti yang telah dikemukakan oleh Zhang dalam jurnalnya yang berjudul *“The Soft Power of a First Lady”* (Zhang, 2017), bahwa kekuatan istri kepala daerah tidak hanya berasal dari jabatan suaminya, tetapi juga dari kemampuan membangun kesan dan kepercayaan publik melalui penampilan dan interaksi sosial yang mereka bangun sendiri. Selain itu, bu Tia juga menunjukkan kesadaran tinggi untuk tetap menjaga batas antara ranah domestik dan politik. Beliau berupaya agar percakapan di rumah tidak menambah beban pekerjaan suaminya:

“Sebisa mungkin saya itu tidak mencampuri urusan masalah pekerjaan maupun urusan politik... kalau di rumah ya saya usahakan supaya tidak bertanya-tanya masalah pekerjaan. Suami kan capek, jadi di rumah ya sudah, tidak banyak bertanya.”

Pernyataan diatas menggambarkan peran istri sebagai penyeimbang emosional dan penjaga harmoni dalam kehidupan politik keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Kuipers dan Timmermans dalam jurnal mereka yang berjudul *“From Wife to Presidential Partner”* (Kuipers dan Timmermans, 2021). Dalam

jurnal tersebut dijelaskan bahwa pasangan seorang pemimpin memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas psikologis dan citra publik pemimpin.

Dalam hal ini, pengalaman bu Tia hampir sama dengan yang dialami ibu Iriana Joko Widodo, yang mana juga dikenal mendampingi suami dengan sikap sederhana dan tidak menonjolkan diri, serta Michelle Obama, dimana mereka menggunakan pengaruh simboliknya untuk memperkuat legitimasi politik suaminya tanpa mengambil peran politik langsung. Ketiganya menggambarkan bentuk komunikasi politik yang halus, berbasis empati dan moralitas keluarga (Badas dan Stauffer, 2019).

3.1.2 Masa Pencalonan

Pada masa pencalonan, bu Tia membantu pak Hendi dalam menyusun strategi kampanye yang efektif. Bu Tia berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan perempuan. Strategi bu Tia dalam merangkul pemilihan perempuan adalah dengan sosialisasi melalui kegiatan olahraga, seperti senam pagi:

“misalnya senam misalnya e ikut kegiatan PKK sosialisasinya lewat senam lah ya PKK gitulah. Malah jarang saya ini bareng sama pak Hendi, mungkin sesekali, tapi biasanya lebih banyak sendiri sama temen-temen ya kenal ya itu yang namanya bu Pepi ya.”

Selain itu, bu Tia juga melakukan pendekatan berbasis kesehatan. Salah satu kegiatan beliau dalam pendekatan ini adalah dengan cara mengunjungi Posyandu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk berinteraksi langsung dengan para ibu atau perempuan dan kader kesehatan. Bu Tia juga menggunakan jaringan Tim Penggerak PKK untuk melakukan sosialisasi dan kampanye di ruang lingkup para ibu. Selain itu, beliau juga membantu pak Hendi dengan cara berkampanye secara pribadi atau tidak bersama dengan pak Hendi. Pembagian tugas ini dilakukan agar pendekatan kepada masyarakat lebih efektif.

Komunikasi politik yang dilakukan bu Tia pada masa ini lebih mengarah kepada pendekatan yang halus dan penuh kehati-hatian. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, pak Hendi lebih berfokus pada segmen politik, sedangkan bu Tia berfokus pada pendekatan sosial pada para ibu. Dalam berkomunikasi bu Tia juga melakukan penyaringan dalam komunikasi internal dengan pak Hendi pada saat dirumah atau saat tidak sedang berperan sebagai calon tokoh politik. Bu Tia membatasi untuk tidak mencampuri urusan pak Hendi yang berkaitan dengan politik, karena menurut bu Tia keseharian pak Hendi pada masa pencalonan sudah sangat sibuk dan melelahkan, maka dari itu bu Tia tidak ingin menambah beban pikiran pak Hendi:

“Iya, jadi saya harus benar-benar menjaga apa yang saya bicarakan. Apa yang saya tanyakan itu harus-harus bener-bener saya saring. Dan juga lihat kondisi kalau misalnya kondisinya mungkin lagi capek lagi ada persoalan di kantor atau mungkin e dalam dunia perpolitikan ya saya sebisa mungkin gak enggak banyak bertanya gak banyak e apa ya, ya saya gak banyak enggak banyak bertanya.”

Dari kutipan tersebut, dapat dikatakan, bahawa sebagai seorang istri, bu Tia memposisikan diri menjadi pendengar untuk pak Hendi. Disini bu Tia bersifat pasif-suportif, yang artinya bu Tia hanya berpendapat ketika pak Hendi meminta.

3.1.3 Masa Kampanye

Pada masa kampanye merupakan fase yang penting dalam menandai pergeseran peran istri dari sekadar pendamping privat menuju aktor simbolik di ruang publik. Dalam wawancara, bu Tia menggambarkan masa kampanye suaminya sebagai periode yang membutuhkan penyesuaian besar terhadap sistem kerja politik yang padat serta eksposur publik yang meningkat. Beliau mengatakan:

“Kampanye itu 2009, lumayan berat juga karena kampanye dari pagi sampai malam, terus jarang ketemu sama anak. Jadi kalau anak-anak tahu saya pergi, kadang rewel karena biasa saya di rumah.”

Dari perkataan bu Tia tersebut menunjukkan bahwa proses kampanye bukan hanya persoalan politik dan pemilu, tetapi juga menyangkut negosiasi peran domestik dan publik. Sebagai seorang ibu dan istri calon kepala daerah, bu Tia harus menjaga keseimbangan antara tanggungjawab keluarga dan tanggungjawab sosial untuk tampil mendukung suami. Seperti yang dikatakan Parry-Giles dan Blair yang menyebutkan bahwa peran perempuan di lingkaran kekuasaan sering melibatkan *double performance*, yaitu menjadi figur seorang ibu di rumah sekaligus simbol moralitas di pandangan masyarakat (Parry-Giles dan Blair, 2002).

Dalam menjalani masa kampanye, bu Tia memilih pendekatan dengan cara menjangkau komunitas perempuan, bukan sekadar mendampingi suami di panggung politik. Beliau mengatakan,

“Saya lebih jarang mendampingi Pak Hendi karena saya lebih banyak berkampanye di ruang ibu-ibu. Misalnya senam, ikut kegiatan PKK, sosialisasinya lewat senam, PKK gitulah. Malah jarang saya bareng sama Pak Hendi, biasanya lebih banyak sendiri sama teman-teman.”

Strategi yang dilakukan bu Tia tersebut menggambarkan bentuk komunikasi politik berbasis gender, di mana perempuan menggunakan ruang sosial-kultural yang akrab seperti kegiatan PKK, posyandu, atau senam pagi sebagai media persuasi dan sosialisasi politik. Pendekatan tersebut merupakan bentuk dari *soft campaign*, dimana pesan politik disampaikan melalui interaksi sosial yang hangat dan non-konfrontatif seperti yang dikemukakan oleh Kalyango dan Winfield dalam jurnal yang berjudul *“Rhetorical Media Framing of Two First Lady Political Candidates Across Cultures”* (Kalyango dan Winfield, 2009). Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa figur perempuan sering diframing oleh publik sebagai simbol empati dan keterhubungan emosional, bukan sebagai tokoh yang melakukan persuasi agresif (Kalyango dan Winfield, 2009). Bu Tia memanfaatkan persepsi ini secara efektif untuk membangun kedekatan dengan konstituen perempuan tanpa melanggar batas peran sosialnya sebagai calon istri kepala daerah.

Meskipun demikian, beliau juga menegaskan bahwa dirinya tetap menjaga jarak dari dinamika politik praktis. Ketika penulis bertanya apakah beliau turut terlibat dalam strategi politik suaminya, beliau menjawab:

“Sebisa mungkin saya itu tidak mencampuri urusan masalah pekerjaan maupun urusan politik. Kalau di rumah ya saya usahakan supaya tidak bertanya-tanya masalah pekerjaan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan kesadaran reflektif mengenai batas etika istri kepala daerah, yakni menjaga netralitas dan fokus pada peran sosial, bukan politik formal. Seperti yang dikatakan Kuipers dan Timmermans, dimana peran semacam ini termasuk dalam konsep *“presidential partner diplomacy”* atau dukungan strategis yang bersifat simbolik dan emosional untuk menjaga kredibilitas publik pasangan pemimpin (Kuipers dan Timmermans, 2021).

Selama masa pencalonan, Bu Tia juga menghadapi tekanan emosional akibat eksposur publik dan kompetisi politik yang tajam. Namun ia memilih untuk tidak menunjukkan kecemasan di depan umum dan menekankan pentingnya menjaga citra positif keluarga:

“Kalau misalnya sedih ya sedih, tapi enggak bisa nangis. Malah jadi mikir, kenapa ya, kok aku sekarang harus begini. Sampai rumah takut salah, nanti ngomong salah enggak.”

Kutipan tersebut menunjukkan bentuk *self-monitoring communication*, yaitu kemampuan untuk mengontrol ekspresi dan bahasa tubuh demi menjaga persepsi publik. Konsep ini juga dikemukakan dalam jurnal yang ditulis oleh Zhang dalam jurnalnya yang berjudul *“The Soft Power of a First Lady”* (Zhang, 2017) di mana perilaku dan penampilan seorang perempuan menjadi instrumen simbolik dalam menjaga kredibilitas politik keluarga di mata masyarakat.

3.1.4 Masa Awal Jabatan

Setelah proses kampanye dan pencalonan yang intens, fase berikutnya bagi seorang istri kepala daerah adalah menyesuaikan diri dengan perubahan status dan tanggung jawab publik yang secara otomatis melekat pada jabatan suami. Dalam wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, bu Tia

mendeskripsikan periode awal suaminya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang, hingga kemudian menjadi Wali Kota, sebagai masa pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan, beliau mengatakan:

“Awal-awal menjabat sebagai wakil wali kota, aku ngikutin kegiatan karena setiap istri wakil wali kota itu kan punya tugas fungsional sebagai wakil ketua Tim Penggerak PKK, otomatis aktif di kegiatan PKK.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana peran publik seorang istri kepala daerah tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui mekanisme struktural yang sudah melekat pada jabatan politik suaminya. Dalam pernyataan bu Tia tersebut, penulis juga mengetahui bahwa PKK merupakan wadah utama bagi istri kepala daerah untuk belajar mengelola organisasi sosial dan menjalin komunikasi lintas sektor dengan masyarakat.

Dalam menjalankan peran barunya, bu Tia mengakui bahwa adaptasi terhadap lingkungan sosial dan ekspektasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi beliau. Beliau menyampaikan:

“Penyesuaian harus menyesuaikan... tidak terbiasa untuk sambutan, tidak biasa berhadapan dengan masyarakat banyak. Itu pengalaman yang tidak mudah, tapi juga tidak susah, harus dipelajari.”

Pernyataan bu Tia tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan, di mana kemampuan komunikasi publik diperoleh melalui pengalaman, observasi, dan partisipasi langsung. Dalam konteks teori Parry-Giles dan Blair (2002), hal ini menunjukkan adanya *rhetorical agency*, yaitu kemampuan seorang perempuan membentuk identitas dalam pandangan masyarakat melalui praktik komunikasi simbolik dalam jabatan non-formal.

Ketika suaminya dilantik menjadi Wali Kota Semarang pada tahun 2013, peran bu Tia pun beralih menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Beliau mengungkapkan:

“Pasti lebih sibuk pada waktu menjadi ketua Tim Penggerak PKK... pinter-pinternya kita beradaptasi dan semua harus dilakukan. Banyak bertanya, menghargai pendapat orang, dan gimana caranya berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait.”

Dalam pernyataan tersebut, bu Tia menunjukkan seperti apa dinamika transformasi kepemimpinan perempuan di ruang sosial. Bu Tia tidak hanya menjalankan fungsi representatif, tetapi juga aktif dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi dengan organisasi pemerintah daerah. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa ilmu mengenai kepemimpinan tidak didapat dari pendidikan formal, melainkan dari pengalaman dan interaksi langsung dengan masyarakat:

“Pembelajarannya itu tidak ada di sekolah, tidak ada di buku, tapi di masyarakat. Harus banyak belajar, banyak minta pertimbangan, banyak menerima masukan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk *experiential leadership*, atau kemampuan memimpin yang tumbuh melalui praktik sosial. Dalam konteks teori Zhang tentang *soft power of the first lady*, hal yang dilakukan bu Tia ini menciptakan legitimasi simbolik yang memperkuat citra moral kepemimpinan suami, sekaligus membangun kredibilitas personal istri di ruang sosial (Zhang, 2017).

Selain menjalankan fungsi koordinatif, Bu Tia juga berperan dalam mendukung kebijakan publik melalui kegiatan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Beliau menuturkan:

“Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama pengurus Tim Penggerak PKK adalah mengikuti program dari pemerintah... misalnya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk, atau angka kematian ibu hamil yang tinggi, itu kita sosialisasi.”

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa bu Tia berperan sebagai aktor komunikasi publik yang mana hal tersebut menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Beliau menjadi jembatan antara pemerintah dengan kebutuhan sosial masyarakat, memperkuat fungsi PKK sebagai wadah komunikasi partisipatif pemerintah daerah.

Peran yang bu Tia perankan ini sesuai dengan penelitian yang berfokus pada pentingnya *policy partner role* dari pasangan pemimpin yaitu ketika istri

pejabat turut mendukung implementasi kebijakan dengan pendekatan sosial, bukan politis.

Selain itu, Tia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama tim dan koordinasi lintas program. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan program PKK dilakukan melalui pembagian tugas berdasarkan empat Kelompok Kerja (Pokja), masing-masing fokus pada pembinaan karakter, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesehatan lingkungan. Melalui struktur ini, ia berusaha mengintegrasikan visi pemerintah daerah dengan aktivitas sosial yang bisa diterapkan di tingkat masyarakat.

3.1.5 Pertengahan Masa Jabatan

Pada pertengahan masa jabatan, peran bu Tia sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang berkembang menjadi lebih mandiri dan strategis. Setelah melalui proses adaptasi di awal masa jabatan, beliau mulai membentuk gaya kepemimpinan yang berfokus pada kerja sama, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam wawancara yang penulis lakukan, bu Tia menyampaikan:

“Pinter-pinternya kita beradaptasi dan semua harus dilakukan, banyak bertanya, menghargai pendapat orang, dan gimana caranya berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Karena kan PKK di bawah DP3A, jadi koordinasinya itu butuh pembelajaran.”

Pernyataan dari bu Tia tersebut memperlihatkan bagaimana proses kepemimpinan sosialnya tumbuh dari pengalaman yang sudah beliau alami. Beliau juga menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks teori Zhang tentang *soft power of the first lady*, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan seorang perempuan di ruang publik sering kali bersumber dari kemampuan membangun relasi yang harmonis, dan bukan dari otoritas formal (Zhang, 2017).

Selain itu, bu Tia juga menegaskan bahwa belajar mengenai kepemimpinan tidak berhenti begitu saja, melainkan berlangsung terus-menerus melalui praktik sosial:

“Pembelajarannya itu tidak ada di sekolah, tidak ada di buku, tapi di masyarakat. Harus banyak belajar, banyak minta pertimbangan, banyak menerima masukan. Pokoknya banyak belajar sehingga lama-lama kan terbiasa.”

Pernyataan tersebut mendeskripsikan bentuk *reflexive leadership*, yaitu kepemimpinan yang tumbuh dari refleksi dan pengalaman langsung. Dalam hal ini, bu Tia tidak hanya menjadi pelaksana program pemerintah, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan inspirator bagi pengurus dan anggota PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kegiatan yang dilakukan di pertengahan masa jabatan ini menunjukkan peningkatan intensitas dan kompleksitas. Beliau menjelaskan:

“Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah mengikuti apa yang menjadi program dari pemerintah, lalu kami sosialisasikan melalui kegiatan PKK misalnya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk atau penurunan angka kematian ibu hamil. Di setiap awal tahun kami berkoordinasi dengan dinas untuk menentukan apa sih program kita.”

Peran tersebut merefleksikan bentuk komunikasi kebijakan partisipatif, di mana kebijakan pemerintah dikemas menjadi kegiatan sosial yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks teori Kuipers dan Timmermans (2021), hal ini termasuk ke dalam *policy partner role* peran istri pemimpin sebagai jembatan antara kebijakan dan komunitas, melalui pendekatan kultural yang lembut dan inklusif.

Bu Tia juga memperhatikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak agar program berjalan efektif dan efisien. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKK dilakukan melalui koordinasi lintas program dengan struktur Pokja (1-4), masing-masing memiliki fokus berbeda seperti pembinaan karakter, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesehatan lingkungan. Model ini memperkuat jejaring sosial dan memastikan bahwa kegiatan PKK sejalan dengan visi pemerintah daerah.

Selain menjalankan program, Bu Tia mulai memposisikan dirinya sebagai panutan bagi para perempuan di lingkungan pemerintahan. Ia mengajarkan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik, tangguh menghadapi tekanan, serta selalu menjaga citra positif di ruang publik. Seperti yang beliau sebutkan:

“Permasalahan yang muncul itu pasti berbeda-beda. Misalnya gimana caranya bikin rencana kerja satu tahun, supaya programnya berjalan baik didukung sama kader-kader Tim Penggerak PKK. Jadi harus terus belajar, terus berpikir supaya program benar-benar dirasakan masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya transisi dari masa pembelajaran menuju masa kepemimpinan. beliau tidak lagi hanya beradaptasi, tetapi mulai memimpin dengan visi yang berfokus pada dampak sosial. Fenomena tersebut sejalan dengan studi Badas dan Stauffer (2019) tentang *Michelle Obama as a Political Symbol*, yang meneliti bagaimana figur perempuan publik dapat menggunakan pengaruh sosial untuk mengarahkan perhatian masyarakat pada isu-isu kesejahteraan tanpa menonjolkan ambisi politik pribadi.

Pada pertengahan masa jabatan ini, bu Tia juga menunjukkan konsistensi dalam menjaga reputasi dan kredibilitas keluarga. Ia memahami bahwa posisi publik menuntut keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian. Kesadaran ini menciptakan bentuk komunikasi politik yang lebih matang berbasis empati, kolaborasi, dan integritas.

3.1.6 Akhir Masa Jabatan

Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wali Kota Semarang, dinamika kehidupan publik keluarga bapak Hendrar Prihadi dan ibu Tia memasuki fase transisi yang menuntut keseimbangan baru antara karir, keluarga, dan pengabdian sosial. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, bu Tia mengatakan bahwa menjelang akhir masa jabatan bukan sekadar proses

administratif, tetapi juga momen refleksi atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama masyarakat. Beliau mengatakan:

“Setelah jadi wali kota, tugas pokoknya ya lebih ke pemerintahan... tapi kalau ada waktunya untuk berkoordinasi dengan partai ya tetap dilakukan. Pak Hendi berkegiatan di pemerintahan, saya di sosial dengan warga masyarakat.”

Kutipan diatas menunjukkan bahwa pada saat mendekati akhir masa jabatan, pembagian peran antara keduanya semakin jelas. Pak Hendi fokus pada birokrasi dan politik, sedangkan bu Tia memperkuat basis sosial yang telah dibangun selama menjabat sebagai Ketua PKK. Dalam hal ini, beliau menjalani peran sebagai penjaga kesinambungan sosial, memastikan agar nilai-nilai pengabdian yang telah ditanamkan selama menjabat tetap berlanjut meskipun posisi jabatan beliau sebagai Ketua PKK telah digantikan.

Beliau juga mengakui bahwa pengalaman menjadi figur publik selama bertahun-tahun telah membentuk ketahanan emosional dan mental yang kuat. Menurut beliau:

“Masalah yang muncul itu pasti berbeda. Tapi lama-lama sudah terbiasa harus bagaimana... harus berpikir terus supaya program-program benar-benar dirasakan masyarakat.”

Pernyataan diatas menunjukkan adanya internalisasi nilai kepemimpinan sosial, di mana tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada berakhirnya jabatan formal. Fenomena ini sesuai dengan konsep *continuity of symbolic leadership* yang dikemukakan oleh Parry-Giles dan Blair (2002) yakni bagaimana figur perempuan publik tetap memegang pengaruh moral bahkan setelah tidak lagi berada dalam struktur kekuasaan.

Ketika masa jabatan suaminya selesai pada tahun 2022 dan beliau ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Presiden Joko Widodo, bu Tia kembali menghadapi fase adaptasi baru. Beliau bercerita:

“Kita hanya mengikuti apa yang menjadi arahan dari pimpinan-pimpinan di atas. Kalau memang ditugaskan di Jakarta, ya dijalani

dengan happy... di LKPP itu saya lebih ke Dharma Wanita. Lingkungannya berbeda dengan di Semarang.”

Berdasarkan kutipan tersebut, bu Tia menunjukkan kematangan sikap dalam menghadapi perubahan. Dari semula berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat kota, sekarang bu Tia beralih ke ruang organisasi yang lebih birokratis dan bersifat internal. Beliau memaknai transisi ini sebagai bagian dari pengabdian beliau, dan bukan penurunan peran.

Pada periode ini bu Tia juga mulai membangun identitas politiknya sendiri. Beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024–2029, dengan motivasi:

“Motivasinya itu kalau saya menjadi dewan, saya punya aspirasi. Berarti aku bisa membantu masyarakat lewat aspirasi dewan.”

Langkah ini menunjukkan perubahan peran bu Tia. Pada awalnya bu Tia berperan sebagai pendamping tokoh politik, pada masa ini bu Tia beralih peran sebagai tokoh politik juga. Sebelumnya, kegiatan bu Tia juga mendukung suaminya, kemudian beralih juga menjadi partisipan dalam ranah representatif. Perubahan ini sesuai dengan hasil penelitian Alvarez-Monsivais dalam jurnal yang berjudul *“From First Lady to Presidential Candidate”*, yang menjelaskan bahwa keterlibatan politik perempuan pasca-jabatan suami seringkali muncul dari akumulasi pengalaman sosial, jaringan komunitas, dan kesadaran akan potensi kepemimpinan pribadi (Alvarez-Monsivais, 2020).

Meskipun demikian, bu Tia tetap menjaga prinsip kesederhanaan dan ketulusan sebagai dasar komunikasi politiknya. Beliau menekankan bahwa perjalanan politik harus dijalani dengan hati yang lapang, seperti ketika pak Hendi tidak terpilih sebagai wakil Gubernur Jawa Tengah di periode yang sama ketika bu Tia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau berkata:

“Sedih, kecewa itu pasti. Tapi sudah jalannya, masa mau dilawan. Kan itu kehendak Allah, ya diterima saja, jangan berlarut-larut sedihnya. Akhirnya kita bangkit lagi, memang belum rezekinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan kedewasaan emosional dan spiritualitas dalam menjalani dinamika politik sebuah dimensi yang jarang dibahas dalam teori komunikasi politik formal, namun sangat relevan dalam konteks budaya Indonesia yang menekankan nilai ikhlas dan ketahanan diri. seperti yang dijelaskan oleh Zhang, narasi seperti ini merupakan bentuk *moral soft power*, di mana kekuatan perempuan berasal dari keteguhan nilai dan keaslian diri, bukan dari dominasi simbolik (Zhang, 2017). Pada fase pasca-jabatan ini, bu Tia juga menunjukkan kemampuan untuk menyalurkan modal sosial yang dibangunnya selama menjadi Ketua PKK ke ruang politik yang lebih luas. Reputasi, jejaring kader, dan kedekatan dengan komunitas menjadi modal komunikasi yang memperkuat kredibilitasnya sebagai calon legislator. Beliau tidak lagi sekadar mendampingi, tetapi turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan, menegaskan bahwa peran istri kepala daerah dapat berevolusi menjadi kedudukan politik yang mandiri.

3.1.7 Koding Dimensi Pengalaman Politik Ibu Krisseptiana

Koding dari dimensi pengalaman politik ibu Krisseptiana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Koding / Encoding Hasil Wawancara Ibu Krisseptiana

Tahap Analisis	Kategori Koding	Bukti Tekstual (Data Transkrip)	Analisis Makna (Encoding/Decoding)
<i>Frameworks of Knowledge</i> (Kerangka Pengetahuan)	Profesionalisme & Adaptasi	"Pembelajaran itu tidak didapat dari sekolah... tapi dari pengalaman-pengalaman jadi jatuh bangun".	Pesan di-encode sebagai proses <i>learning by doing</i> . Latar belakang bankir membantunya beradaptasi dengan protokol.

	Etika & Batasan	"Sebisamungkin saya itu tidak mencampuri urusan masalah pekerjaan maupun urusane di politik".	Terdapat kesadaran pengetahuan untuk memisahkan ranah domestik dan politik praktis demi menjaga harmoni.
<i>Relations of Production</i> (Hubungan Produksi)	Struktur Organisasi	"Setiap istri wakil walikota itu punya tugas fungsional sebagai wakil ketua tim Penggerak PKK".	Peran dan otoritas diproduksi berdasarkan jabatan fungsional yang melekat pada posisi suami.
	Kolaborasi & Hierarki	"Diskusi dengan Pengurus... yang mereka udah senior-senior... banyak menerima masukan".	Produksi program dilakukan melalui dialog dengan tokoh senior dan koordinasi lintas dinas (DP3A).
<i>Technical Infrastructure</i> (Infrastruktur Teknis)	Kanal Komunikasi	"Berkampanye di ruang ibu-ibu, misalnya senam... ikut kegiatan PKK".	Menggunakan infrastruktur sosial (Posyandu, PKK, sekolah) dan teknologi (Zoom/Video Call) untuk penyebaran pesan.
Encoding (Penyandian Pesan)	Citra Publik (Ideal)	"Sakit enggak boleh tampak sakit, sedih enggak boleh tambah sedih, harus tampak selalu sehat dan bahagia".	Bu Tia menyandi dirinya sebagai figur publik yang harus menunjukkan stabilitas emosional di depan masyarakat.
	Aspirasi Politik	"Kalau misalnya saya ini menjadi dewan saya kan punya aspirasi	Pesan politik di-encode sebagai bentuk pengabdian dan perpanjangan tangan dari aspirasi warga.

		berarti aku bisa membantu masyarakat".	
Decoding (Pembacaan/Makna)	Dominan- Hegemonik	"Ibu dan bapak selama memimpin Kota Semarang enggak ada yang negatif... positif terus saya lihatnya".	Pewawancara (Chika) menerima narasi keberhasilan Bu Tia sepenuhnya tanpa keraguan atau oposisi.
	Negosiasi	"Kecewa... pasti dong... tapi sudah jalanya... jangan berlarut-larut sedihnya".	Bu Tia menegosiasikan kegagalan politiknya dengan keyakinan spiritual bahwa hal tersebut adalah kehendak Allah.

Sumber : data primer diolah (2026)

3.2 Hasil Wawancara dengan ibu Listyati Purnama Rusdiana

3.2.1 Awal Karir Suami

Dalam wawancara, Bu Lies menggambarkan perjalanan panjang suaminya sebelum menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang. Narasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan suaminya dalam dunia birokrasi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses bertahap yang panjang. Bu Lies menjelaskan bahwa suaminya memulai karier dari level staf di sekretariat pemerintah kota, kemudian perlahan naik ke berbagai posisi struktural hingga akhirnya dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang. Jabatan Sekda menjadi titik penting karena di posisi tersebut suaminya harus berhadapan dengan tuntutan teknokratis sekaligus dinamika politik yang kian menguat di sekitar dirinya.

Bu Lies menegaskan bahwa suaminya sudah sejak awal tidak pernah berniat terjun ke politik elektoral. Beliau menggambarkan suaminya sebagai sosok yang *"lebih senang bekerja teknis dibanding tampil publik"*,

menunjukkan bahwa orientasi awal karier suaminya lebih pada pelayanan birokratis daripada pencarian kekuasaan formal. Namun, dari sudut pandang seorang istri, pergulatan batin sudah mulai terasa sejak suaminya mendekati jabatan eselon tertinggi kota. Beliau menyatakan bahwa kehidupannya sebagai istri pejabat tinggi otomatis menuntut bentuk performativitas publik, baik yang disadari maupun tidak.

Pada tahap ini, peran bu Lies mencerminkan temuan Parry-Giles & Blair mengenai bagaimana pasangan pejabat membentuk ritme domestik-politik yang khas (Parry-Giles & Blair, 2002). Meski belum masuk lingkaran politik elektoral, dinamika karier suaminya sudah menempatkan bu Lies pada posisi pendamping yang tetap harus menjaga citra, relasi sosial, dan stabilitas keluarga. Relasi tersebut menunjukkan dimensi gender yang kuat: istri diposisikan sebagai penopang moral dan emosional bagi pejabat publik, sekaligus figur representasi yang harus selaras dengan citra suami.

3.2.2 Masa Pencalonan

Pada masa pencalonan bu Lies masih menjalankan perannya sebagai ASN di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu beliau mendukung pak Iswar sebagai calon Wakil Wali Kota secara diam-diam. Hal tersebut dikarenakan status bu Lies sebagai ASN yang tidak boleh berpolitik serta mendukung atau memihak partai politik tertentu. Sehingga beliau tidak boleh terlihat mendukung pak Iswar pada masa pencalonan ini. Hal tersebut membuat bu Lies merasakan dilema. Bu Lies sempat berencana untuk mengajukan cuti agar bisa mendukung pak Iswar namun ada konsekuensi yang akan ditanggung, beliau berkata:

“memang jadi selama bapak kampanye itu sebenarnya ada aturannya boleh cuti di luar tanggungan negara. Tetapi memang maaf kalau boleh cuti jabatan bu Lies hilang ya kan ini bu Lies kan sudah eselon 3 nih di provinsi jabatan hilang kemudian pertama itu terus yang ke-2 memang e apa ada aturannya jadi walaupun cuti kalo kelihatan bahwa itu saya

berperan besar untuk mendukung suami keliatan, apalagi kejepret medsos nah itu sudah ibaratnya aku harus dikeluarkan.”

Sebelum bu Lies memutuskan, beliau berdiskusi dengan anak beliau yang bernama Bogi, yang juga merupakan ASN di Dinas Pembangunan Daerah Kota Semarang, beliau mengatakan:

“wes bu, ibu malah justru jangan cuti malah ibu harus stand by di kantor supaya aman karena kalau ibu malah cuti misalnya ibu cuti ya di rumah gitu di rumah tuh kan sudah banyak orang nih.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bu Lies akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil cuti sebagai ASN dan tetap mendukung pak Iswar dari layar. Beliau merasa bahwa dirinya lebih condong sebagai ASN karena beliau mendeskripsikan diri beliau sebagai pribadi yang netral, beliau berkata:

“bagi bu Lies karena bu Lies itu sudah pengabdian di ASN itu baiknya kan tahun kemarin ya balik dari rong tahun kan gitu, berarti kan aku lebih banyak lebih kuat hatiku tuh di ASN nya kan gitu loh, saya belum bisa berpolitik karena memang juga saya orangnya juga orangnya netral.”

Hal tersebut dikarenakan sebelum bu Lies berperan sebagai istri yang mendukung pak Iswar sebagai calon Wakil Wali Kota, beliau adalah seorang Ketua dari beberapa organisasi masyarakat yang bersifat netral,

“Ormas saya Pemuda Panca Marga itu kan ormas netral, ormas saya IPEMI itu ormas netral.”

Karena hal tersebutlah bu Lies tetap menjabat sebagai ASN dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua organisasi yang beliau pimpin. Cara bu Lies mendukung pak Iswar pada masa pencalonan adalah dengan berbuat baik, karena beliau percaya bahwa dengan berbuat baik maka orang-orang disekitar beliau dan pak Iswar akan tetap setia dan mendukung pak Iswar, dalam wawancara, beliau berkata:

“Nah ibaratnya begitu kan lah saya hanya menilai bahwa saya kalau saya dinilai baik sama mereka otomatis, mereka pasti akan ke saya kan gitu tanpa diminta gitu loh dan itu malah murni.”

3.2.3 Masa Kampanye

Perubahan masa kampanye pak Iswar menjadi momen yang menegangkan sekaligus dilematis bagi Bu Lies sebagai seorang istri sekaligus ASN. Hasil wawancara dengan bu Lies menunjukkan bagaimana posisi istri pejabat berada dalam persimpangan antara loyalitas keluarga dan batasan-batasan etika serta regulasi birokrasi. Literatur tentang peran istri politisi menunjukkan bahwa mereka kerap diposisikan dalam peran simbolik yang ambivalen: hadir namun tidak terlalu menonjol, mendukung namun tetap netral (Kuipers dan Timmermans, 2021 dan Alvarez-Monsivais, 2020). Dinamika serupa terlihat jelas dalam pengalaman bu Lies.

Setelah pak Iswar mengajukan pensiun dini dan menjadi warga sipil, beliau memasuki fase politik elektoral. Bu Lies mengungkapkan:

“Nah dalam perjalanan karena beliau sudah pensiun otomatis kan beliau bebas... H-1 sebelum pendaftaran tau-tau beliau di pinang oleh PDI.”

Namun, kebebasan politik suami tidak serta merta berlaku bagi dirinya. Statusnya sebagai ASN membuat ruang geraknya sangat terbatas. Beliau mengatakan:

“Bu Iswar tidak bisa apa-apa karena status ASN... jadi tidak banyak berpakaian untuk istilahnya ketok mendukung bapak... mungkin mendukung itu silent di belakang layar.”

Narasi ini mempertegas temuan Zhang bahwa pasangan politisi sering kali memainkan peran *soft power* yang tak terlihat, terutama ketika mereka harus menjaga citra institusional dan netralitas formal (Zhang, 2017). Bagi bu Lies, dukungan yang tampak justru berpotensi mengancam kariernya. Beliau menjelaskan risiko itu:

“Walaupun cuti, kalau kelihatan bahwa saya berperan besar mendukung suami, apalagi kejepret medsos, aku harus dikeluarkan.”

Ketakutan ini realistis, mengingat regulasi ASN yang ketat serta pantauan publik dan lembaga seperti Bawaslu.

Dalam situasi tersebut, keputusan untuk tetap bekerja penuh waktu justru menjadi strategi perlindungan. Bu Lies mengikuti saran anaknya yang juga ASN:

“wes bu, ibu malah justru jangan cuti... ibu harus stand by di kantor supaya aman.”

Keputusan ini sejalan dengan temuan Muttaqin bahwa strategi komunikasi istri politisi dalam konteks kampanye sering kali bersifat adaptif dan defensif, menyesuaikan batasan struktural yang mengikat (Muttaqin, 2020).

Meskipun terikat status birokrasi, bu Lies tetap memikul peran sosial yang luas melalui organisasi yang ia pimpin. Beliau menceritakan,

“Kadang-kadang pada saat kampanye organisasi kita masih jalan, saya masih harus tampil... tapi saya juga harus netral karena ormas-ormas ini netral.”

Pengalaman ini menegaskan konsep yang disampaikan Badas bahwa identitas pasangan pejabat publik sering kali terbentuk melalui peran-peran komunitas, bukan hanya arena politik formal (Badas dan Stauffer, 2019). Narasi Bu Lies juga menampilkan ketegangan emosional sebagai istri. beliau mengungkapkan kerinduannya untuk mendampingi langsung suaminya di lapangan, tetapi ketakutan melanggar aturan lebih besar. Beliau berkata:

“Kadang tuh yo nelongso... bojoku dikelilingi di kampanye kok aku ora melu.”

Pada saat beliau mencoba sekadar melihat kampanye dari pinggir jalan, tetapi ketika dikenali oleh kader, beliau panik dan berkata:

“Langsung aku masuk mobil lagi mbak, wedi aku.”

Konflik emosional ini menunjukkan bagaimana peran istri pejabat publik bukan hanya politis, tetapi juga afektif. Beban emosional dan beban regulatif terasa dalam keseharian bu Lies selama masa kampanye. Madsen menyebut ini sebagai *emotional labor of political spouses*, yaitu kerja emosional yang tidak terlihat namun sangat intens (Madsen, 2000).

Selain ketegangan pribadi, kampanye juga menyebabkan dinamika keluarga yang kompleks. Bu Lies berkata:

“Aku mumet... aku ASN, anakku ASN, keponakanku ASN kabeh... sing bisa rewangi bapak mung anakku siji, Nineng.”

Kondisi ini menegaskan bagaimana keluarga politisi sering kali terlibat dalam pekerjaan kampanye secara informal, sebuah pola yang banyak dibahas dalam studi politik keluarga (Kuipers dan Timmermans, 2021).

Meskipun tidak tampil di muka publik, bu Lies tetap berperan melalui koordinasi internal, dukungan moral, dan menjaga stabilitas keluarga. Beliau menegaskan bahwa dukungannya bersifat mengalir:

“Saya ridho, saya mendukung, tapi tidak ada paksaan... mengalir saja.” Sikap pasrah namun tetap berikhtiar ini juga ia hubungkan dengan keyakinan spiritual: *“Allah itu tidak sare... kalau memang amanah ya dijalankan.”*

Dalam penjelasan yang detail, bu Lies menggambarkan bagaimana kampanye memengaruhi rutinitas rumah tangga. Beliau berkata:

“Selama 4 bulan itu aku yo ora nesu... yo rapopo bapak lungo. Kok yo aku kebiasa.”

Sikap menerima ini menunjukkan bagaimana identitas sebagai istri pejabat publik dibentuk melalui pengalaman berulang menghadapi tekanan politik. Di akhir narasinya, bu Lies menyimpulkan bahwa semua proses tersebut merupakan bagian dari takdir dan sejarah keluarga. Beliau mengatakan:

“Jalannya mungkin karena ndelalah keluarga saya dulu ASN, bapak bupati... mungkin ya jalannya ke mantune.”

Pernyataan ini menyiratkan konstruksi makna personal atas perjalanan politik suaminya, sekaligus posisi dirinya sebagai penjaga stabilitas emosional keluarga.

3.2.4 Masa Awal Jabatan

Memasuki awal masa jabatan pak Iswar sebagai Wakil Wali Kota Semarang, dinamika kehidupan bu Lies berubah secara signifikan. Meski demikian, perubahan ini tidak datang sebagai guncangan, melainkan transisi yang beliau hadapi dengan sikap menyesuaikan diri sebuah kualitas yang ditekankan berulang kali:

“Ndelalah, alhamdulillah saya orang paling gampang menyesuaikan diri,” ujarnya ketika menggambarkan bagaimana ia memasuki peran barunya sebagai pendamping seorang kepala daerah.

Pada tahap awal ini, bu Lies langsung menerima amanah struktural sebagai Ketua TP PKK Kota Semarang. Beliau menjelaskan:

“Kegiatan saya karena kebetulan saya dapat amanah ketua TP PKK sehingga itu tetap saja yang kita jalankan... pelantikannya bersamaan dengan TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu.”

Jabatan ini menempatkannya pada posisi strategis di wilayah advokasi keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan awal masa jabatan juga diiringi dengan tambahan peran. Bu Lies mengatakan:

“Kemarin baru saja dikukuhkan untuk Ketua Srikandi Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan kota.”

Hal ini menunjukkan bahwa begitu jabatan suaminya dimulai, perangkat institusional yang menyertai posisi Wakil Wali Kota secara otomatis menarik istri ke dalam jejaring peran sosial-politik. Pada awal masa jabatan ini pula, Bu

Lies mulai menyadari pentingnya menjaga batas peran antara dirinya sebagai istri pejabat publik dan sebagai ASN. Beliau menegaskan:

“Saya punya prinsip kalau ada kegiatan saya tanpa undangan, saya tidak mau ngintilin suami... selama ada undangan ya sama, tapi kalau tidak ada undangan saya nggak mau.”

Prinsip ini memperlihatkan bahwa ia tidak ingin tampil sebagai pendamping yang mengaburkan batas profesionalitas. Sikap ini sejalan dengan literatur terkait etika pasangan pejabat publik yang harus menjaga normativitas peran (Kuipers dan Timmermans, 2021).

3.2.5 Pertengahan Masa Jabatan

Pada periode pertengahan masa jabatan meskipun secara kronologis jabatan belum mencapai setengah periode karena baru berjalan kurang dari satu tahun, bu Lies menangani intensitas peran yang semakin tinggi. Beliau tidak hanya menjalankan PKK, tetapi juga aktivitas lintas organisasi. Beliau mengatakan, *“Kalau IPEMI saya malah dapet tugas... saya sekarang ini mau rapat di tingkat Jawa Tengah.”* Fakta bahwa ia kini mengemban tugas sampai tingkat provinsi menunjukkan eskalasi tanggung jawab sosial yang semakin kompleks. Secara adaptif, bu Lies tetap mengutamakan prinsip fleksibilitas, beliau menjelaskan:

“Saya tuh ngikut aja... alami saja yang dikehendaki, yang penting saya manut.”

Pernyataan ini mengilustrasikan bagaimana ia membangun identitas politik sebagai pendamping yang responsif tetapi tetap berhati-hati terhadap batasan normatif. Pada masa ini, beliau semakin konsisten menegaskan batas etis antara PKK dan suaminya, terutama dalam kegiatan yang tidak mengizinkan kehadiran laki-laki. Beliau menceritakan:

“Saya tahu perasaannya beliau di sana sendirian... tapi PKK kan gabolet ada laki-laki. Saya harus menempatkan diri.”

Kesadaran terhadap batas gender institusional seperti ini mencerminkan tipologi peran istri pejabat yang tidak hanya simbolis, tetapi juga regulator identitas (Zhang, 2017). Di tengah kesibukan, ia tetap berpegang pada regulasi ASN dengan berkata:

“Saya tidak mau bermain... normatif aturan gitu aja karena ndilalah saya ASN, wes diajari ojo macam-macam.”

3.2.6 Akhir Masa Jabatan

Karena jabatan pak Iswar pada saat wawancara berlangsung belum mencapai satu tahun, narasi bu Lies mengenai akhir masa jabatan lebih bersifat proyektif, yakni gambaran tentang keberlanjutan perannya dan ritme kerja yang beliau bayangkan akan tetap dijalani hingga masa jabatan suaminya berakhir.

Meski belum memasuki tahun pertama jabatan, bu Lies menggambarkan pola yang kemungkinan besar akan berlanjut sepanjang periode. Ia menegaskan konsistensi kerja PKK dengan 4 Pokja:

“Pokja 1 pembinaan karakter, pokja 2 ketahanan ekonomi keluarga, pokja 3 ketahanan pangan, pokja 4 kesehatan dan lingkungan.”

Fokus utama mereka adalah program pemerintah seperti “Semarang Sehat” dan “Semarang Bersih”. Beliau menjelaskan:

“Kita punya 10 program PKK... sandang, pangan, gotong royong... semua tetap jalan.”

Hal ini menunjukkan bahwa di fase mendatang, keberlanjutan program menjadi prioritas utama. Bu Lies menggambarkan bahwa target sasaran tetap pada keluarga dan lingkungan komunitas:

“PKK itu kan ke keluarga... suami, istri, anak... kemudian lingkungan RT, RW, kelurahan. Mereka harus peka, mendukung, mengedukasi, menggerakkan.”

Penggambaran ini menunjukkan keberlanjutan visi PKK sebagai organisasi yang mendampingi struktur pemerintahan dalam membangun kesejahteraan komunitas.

3.2.7 Koding Dimensi Pengalaman Politik ibu Listyati Purnama Rusdiana

Koding dari dimensi pengalaman politik ibu Listyati Purnama Rusdiana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Koding / Encoding Hasil Wawancara Ibu Listyati Purnama Rusdiana

Tahap Analisis	Kategori Koding	Bukti Tekstual (Data Transkrip)	Analisis Makna (Encoding/Decoding)
<i>Frameworks of Knowledge</i> (Kerangka Pengetahuan)	Kesadaran Birokrasi & Regulasi	"...ndilalah saya kan ASN, wes diajari ojo macam-macam kan ngono kuwi lho..." "...ada pakta integritas yang saya harus tanda tangan..."	Encoding: Pemahaman mendalam Bu Lies sebagai ASN senior (sejak 1993) membentuk cara pandangnya yang sangat patuh pada aturan formal birokrasi, sehingga ia sangat berhati-hati dalam bertindak.
	Habitus Kepemimpinan Keluarga	"...latar belakang keluarga saya... bapak juga pernah jadi bupati di Wonogiri dan Sukoharjo..."	Encoding: Pengetahuan tentang dunia politik dan jabatan publik bukan hal baru baginya. Hal ini membentuk mentalitas "tidak ambisius" karena sudah terbiasa dengan fasilitas kekuasaan sejak kecil.
<i>Relations of Production</i> (Hubungan Produksi)	Struktur Ganda (Dual Peran)	"...saya harus berbagi waktu atau pekerjaan kantor... pekerjaan organisasi belum lagi sebagai	Encoding: Produksi narasi politiknya berada di bawah tekanan struktur ganda: ia harus menjalankan tugas dinas sebagai ASN, mengelola banyak ormas, sekaligus menjalankan fungsi

		pendamping bapak..."	domestik/protokoler pendamping suami.
	Disiplin Kelembagaan (Gatekeeping)	"...Bawaslu juga mengamati terus, ngawal... saya tahu cuman kan memang saya enggak ngapa-ngapain..."	Encoding: Institusi negara (Bawaslu & BKD) bertindak sebagai <i>gatekeeper</i> . Hubungan produksi pesan dipisahkan secara ekstrem: dukungan politik tidak boleh diproduksi di ruang publik birokrasi.
<i>Technical Infrastructure</i> (Infrastruktur Teknis)	Kanal Sosial-Kultural & Jaringan Ormas	"...ormas-ormas ini adalah ormas netral... Pemuda Panca Marga... IPEMI..."	Encoding: Memanfaatkan modal sosial berupa jaringan organisasi yang majemuk (lintas partai) sebagai infrastruktur senyap. Pesan tidak disalurkan lewat parpol, melainkan lewat relasi interpersonal yang "murni".
Encoding (Penyandian Pesan)	Penyandian "Dukungan Senyap" (<i>Silent Support</i>)	"...bu Iswar tidak bisa apa-apa karena bu Iswar status ASN... mendukung itu silent ya dibelakang layar."	Encoding: Mengonstruksi narasi "istri yang taat asas". Dukungan politik sengaja disandikan dalam bentuk non-verbal, doa, rida, dan penyediaan data melalui anaknya, bukan melalui mobilisasi massa langsung.
	Penyandian "Prinsip Normatif"	"...kalau ada kegiatan-kegiatan saya tanpa undangan saya enggak mau ngintilin suami saya..."	Encoding: Menyandi perannya bukan sebagai "aksesori politik" suami. Ia menetapkan batasan ruang (<i>space boundaries</i>) yang tegas berdasarkan fungsi regulasi formal.

Decoding (Pembacaan/Makna)	Penerimaan Hegemonik (Peneliti)	"Itu eh udah hampir semua kejawab Ibu." "Saya lihat beritanya itu ya?"	Decoding: Peneliti (Chika) berada pada posisi dominan-hegemonik, mengonfirmasi aktivitas publik Bu Lies melalui validasi media online tanpa mempertanyakan dilema moralnya sebagai ASN yang suaminya berpolitik.
	Negosiasi Tuntutan Peran (<i>Negotiated Code</i>)	"...kadang tuh yo nelongso ah bojoku dikelilingi... dikampanyeke lo lah aku kok ya rak melu."	Decoding: Terjadi pembacaan negosiasi dalam diri Bu Lies. Secara emosional ia ingin hadir di panggung politik mendukung suami (<i>nelongso</i>), namun diredam oleh kepatuhan rasionalnya terhadap aturan ASN demi keselamatan kariernya.

Sumber : data primer diolah (2026)

3.3 Hasil Wawancara dengan ibu Inggit Soraya

3.3.1 Awal Karir Suami

Pada masa sebelum menjabat sebagai Walikota Pekalongan, suami bu Inggit Soraya menjalani karir yang sama sekali tidak berkaitan dengan dunia politik. Beliau berprofesi sebagai seorang pengusaha dan bekerja di sebuah perusahaan percetakan, tempat ia dipercaya memegang posisi sebagai direktur. Seluruh aktivitas profesionalnya bertumpu pada dunia kewirausahaan, tanpa pengalaman maupun latar belakang politik sebelumnya. Karena itu, bagi keluarga, arah karir menuju jabatan Walikota sebenarnya bukan sesuatu yang pernah direncanakan maupun dibayangkan sebelumnya.

Sejalan dengan kesibukan suami di dunia usaha, Ibu Inggit sendiri juga menekuni kegiatan wirausaha berbasis kerajinan atau *craft*. Berawal dari aktivitas iseng di rumah sambil mengurus anak-anak, Ibu Inggit mulai membuat berbagai produk kerajinan seperti sulam aplikasi, dompet, tas, hingga aksesoris berbahan kain perca. Kegiatan yang bermula dari hobi tersebut berkembang menjadi usaha kecil bernama *Racik Kelir*, yang kemudian semakin maju hingga memasuki berbagai pameran, termasuk Inacraft, serta sempat dipasarkan di ruang pameran Bandara Ahmad Yani. Dari usaha rumahan yang dikerjakan sendiri, Ibu Inggit bahkan sempat mempekerjakan sekitar 14 - 15 karyawan sebelum akhirnya mengurangi aktivitas operasional saat tanggung jawab sebagai pendamping Wali Kota semakin besar.

Ketertarikan suami dalam dunia politik pun pada awalnya tidak muncul secara alami. Menurut Ibu Inggit, beliau tidak memiliki rencana atau ketertarikan khusus untuk memasuki ranah politik. Namun perjalanan hidup kemudian membawa suami Ibu Inggit menempuh jalur tersebut, hingga akhirnya dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Pekalongan. Latar belakang suami sebagai pengusaha serta pengalaman Ibu Inggit sebagai pelaku UMKM menjadi bekal yang justru memperkaya peran mereka ketika memasuki dunia pemerintahan dan pengabdian publik.

3.3.2 Masa Pencalonan

Proses awal Pak Aaf memasuki dunia politik bermula bukan dari ambisi pribadi, melainkan dari dorongan dari keluarga besar. Bu Inggit menjelaskan bahwa kakak kandung suaminya pernah menjabat sebagai Wali Kota Pekalongan, namun wafat ketika masih berada di tahun kedua masa jabatan. Kondisi tersebut membuat posisi Wakil Wali Kota naik menggantikan Wali Kota, sehingga selama beberapa waktu Kota Pekalongan tidak memiliki wakil. Dalam situasi inilah keluarga besar menyarankan agar suami Bu Inggit mempertimbangkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Beliau berkata:

“Awalnya sempat ditawarkan menggantikan kakak. Itu paling enggak mencalonkan untuk jadi wakil, mengisi kekosongan wakil.”

Meskipun demikian, pada awalnya suami bu Inggit tidak menanggapi serius dorongan tersebut karena memang tidak memiliki rencana berkarir di dunia politik. Keraguan juga datang dari pihak bu Inggit sendiri. Ketidaktahuannya terhadap dunia politik membuat beliau merasa takut dan berat melepas suaminya dari dunia usaha yang selama ini menjadi fokus keluarga. Beliau mengenang masa itu sebagai fase yang penuh pertimbangan:

“Saya sempat tidak setuju, karena ada rasa ketakutan... belum pernah berkecimpung di politik.”

Namun dorongan keluarga dan rekan dekat yang cukup kuat, sehingga akhirnya pak Aaf menerima amanah tersebut dan dilantik menjadi Wakil Wali Kota pada periode 2017 - 2018. Proses pelantikan bahkan berlangsung tiba-tiba dan tanpa persiapan khusus, karena pada saat kabar diterima, bu Inggit sedang berada di luar kota. Setelah pelantikan, beliau otomatis mendampingi suami dalam berbagai peran kedinasan, termasuk sebagai Wakil Ketua PKK dan Wakil Ketua Dekranasda. Fase awal ini menjadi masa adaptasi besar bagi beliau:

“Saya mengikuti mengalir sambil belajar. Dunia saya sebenarnya craft, tapi tiba-tiba harus mendampingi bapak. Ya mau tidak mau harus menyesuaikan.”

Memasuki periode berikutnya, yaitu pencalonan suaminya sebagai Wali Kota, prosesnya telah berbeda. Bila sebelumnya pendorong utama adalah keluarga, maka pada pencalonan sebagai Wali Kota muncul pula keinginan pribadi dari suami bu Inggit untuk melanjutkan pengabdian. Selain dorongan keluarga yang masih kuat, ada pertimbangan politis mengenai keberlanjutan kepemimpinan kakaknya yang terhenti akibat wafat. Bu Inggit menjelaskan:

“sayang kalau tidak ada yang meneruskan dari pihak keluarga”, apalagi kakak pak Aaf pernah berjuang lama untuk mencapai posisi tersebut.

3.3.3 Masa Kampanye

Pada masa ini awalnya pak Aaf tidak berkampanye untuk posisinya sebagai Wakil Wali Kota, karena pak Aaf hanya mengisi posisi kosong Wakil Wali Kota sebelumnya yang merupakan kakak pak Aaf yang telah meninggal dunia. Menurut hasil wawancara penulis dengan bu Inggit, pak Aaf langsung melakukan pendaftaran sebagai Wakil Wali Kota dan langsung menjabat:

“Kalau yang wakil kan kita tidak melalui kayak kampanye dan lain-lain kan. Itu kan langsung mendaftar, langsung dilantik menjadi wakil.”

Pak Aaf mulai melakukan kampanye pada saat periode pertama pencalonan beliau sebagai Wali Kota. Awalnya bu Inggit sempat kaget karena sebelumnya tidak ada diskusi antara pak Aaf dan bu Inggit mengenai hal tersebut. Namun karena pak Aaf sudah ada keinginan sendiri untuk mencalonkan diri, bu Inggit menyetujui keputusan pak Aaf.

Selama masa kampanye, bu Inggit mengambil peran yang lebih aktif dibanding periode ketika suami menjadi Wakil Wali Kota. Beliau terlibat dalam kegiatan sosialisasi terutama di kalangan perempuan, karena menurutnya suami akan lebih canggung jika harus masuk ke kelompok ibu-ibu. Beliau menyatakan:

“Saya yang bantu sosialisasi ke ibu-ibu, ke pengajian, ke komunitas perempuan, sampai kegiatan senam di masyarakat.”

Adapun diskusi-diskusi penting mengenai pasangan calon, strategi politik, dan penyusunan tim kampanye tidak melibatkan dirinya. Suaminya lebih banyak berdiskusi dengan kakak-kakaknya dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman di dunia politik. Beliau sendiri hanya diminta memberikan dukungan moral. Beliau berkata:

“Kalau dari saya itu cuma untuk meminta restu saja.”

3.3.4 Awal Masa Jabatan

Memasuki masa ketika suami bu Inggit resmi menjabat sebagai Wali Kota Pekalongan, perubahan besar terjadi pada keseharian dan tanggung jawab yang diemban oleh dirinya. Sebagaimana beliau sampaikan, pelantikan suaminya otomatis diikuti dengan pelantikan berbagai jabatan yang melekat pada posisi istri kepala daerah. Beliau menyebut:

“Saya dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, Bunda Gemarikan, Bunda GenRe, Bunda Forum Anak. Jabatan saya mungkin lebih banyak dari bapak.”

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa luasnya ranah pengabdian yang langsung dipikul sejak hari pertama masa jabatan dimulai. Dalam menjalankan perannya, bu Inggit berusaha memastikan setiap program yang ia jalankan selaras dengan visi dan program kerja suaminya sebagai Wali Kota. Hal ini tampak dari keterlibatannya yang intens dengan berbagai OPD terkait. PKK, misalnya, berada di bawah koordinasi DPMPPA dan memiliki cakupan program yang sangat luas. Beliau menjelaskan bahwa 10 Program Pokok PKK bersinggungan erat dengan isu-isu sosial, pendidikan, ekonomi keluarga, kesehatan, UMKM, hingga lingkungan. Menurut beliau, program-program tersebut:

“turun-temurun dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW sampai Dasawisma,”

Sehingga ia memaknainya sebagai perangkat penting untuk membantu percepatan program pemerintah daerah. Selain PKK, jabatan-jabatan lain yang melekat pada dirinya juga memerlukan koordinasi lintas sektor. Sebagai Bunda PAUD beliau bersinergi dengan Dinas Pendidikan, sementara sebagai Ketua Dekranasda beliau berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Perannya sebagai Bunda Gemarikan menuntut kerja sama dengan Dinas

Kelautan dan Perikanan untuk mengkampanyekan konsumsi ikan kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa setiap kegiatan bergabung dengan OPD sehingga beliau harus rutin berdiskusi mengenai program, permasalahan, serta strategi penyelesaiannya.

Dalam proses adaptasi awal, bu Inggit mengakui bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk memahami dunia pemerintahan yang sebelumnya tidak pernah digeluti. Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan ibu rumah tangga, dunia birokrasi menghadirkan pengalaman yang sepenuhnya baru baginya. Beliau menuturkan bahwa pada masa-masa awal:

“Saya tetap karena basic-nya enggak ada di situ, jadi memang harus belajar. Awal-awal ini saya belajar sendiri karena ilmunya tidak ada sekolahnya.”

Kurangnya pendidikan formal mengenai peran istri kepala daerah membuatnya mengandalkan pengalaman, pertemuan dengan banyak orang, serta frekuensi audiensi untuk memperluas pengetahuan.

Seiring berjalannya waktu, ritme kegiatan yang semakin padat justru membantunya beradaptasi dengan lebih cepat. Menurut pengakuannya dan komentar dari orang-orang di sekitarnya, ia termasuk cepat belajar. Pertemuan dengan berbagai pihak, diskusi dengan ASN, serta sharing bersama istri-istri kepala daerah dari daerah lain semakin memperkaya wawasannya. Kegiatan melalui forum seperti APEKSI memberikan ruang baginya untuk bertukar praktik baik dan memahami perbedaan tantangan daerah lain:

“Permasalahan itu ada yang sama, ada yang berbeda... dari situ bisa tukar ilmu.”

Dengan semakin banyaknya *stakeholder* yang terlibat, mulai dari organisasi masyarakat, komunitas pendidikan seperti HIMPAUDI atau IGTKI, hingga universitas, bu Inggit menekankan pentingnya kerja kolaboratif.

3.3.5 Pertengahan Masa Jabatan

Memasuki pertengahan masa jabatan, peran bu Inggit semakin matang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan intensitas kegiatan yang dijalannya. Beliau menggambarkan fase ini sebagai periode di mana dirinya mulai benar-benar terbiasa dengan ritme tugas sebagai istri kepala daerah sekaligus pemangku berbagai jabatan sosial kemasyarakatan. Kemampuan adaptasinya dinilai cepat oleh rekan-rekan di lingkungan PKK, sebagaimana ia sendiri menyampaikan bahwa ia terus belajar secara mandiri karena tidak ada pendidikan formal yang secara khusus menyiapkan seseorang untuk menjadi istri wali kota atau ketua organisasi-organisasi pendamping pemerintah daerah. Beliau menjelaskan:

“menurut teman-teman saya di PKK, kalau saya termasuk cepat untuk belajar” lalu menambahkan bahwa sejak awal beliau harus *“menggali, ini harus belajar, awal-awal ini saya belajar sendiri”* karena menurut beliau *“tidak ada sekolahnya untuk jadi istri kepala daerah”*.

Keberhasilan bu Inggit dalam memahami tugasnya diperoleh dari proses pertemuan dengan berbagai pihak, diskusi, serta peningkatan jam terbang. Beliau menegaskan bahwa pengetahuan yang dimilikinya berkembang dari interaksi langsung dengan masyarakat, OPD, dan berbagai organisasi eksternal:

“Dengan ketemu banyak orang... informasi kita lebih luas, yang tadinya tidak tahu jadi tahu” ungkapanya.

Dalam fase ini, beliau juga menyadari pentingnya keluar dari zona nyaman dan terus menggali ilmu, termasuk melalui pemanfaatan media sosial dan belajar dari figur istri kepala daerah lain di berbagai wilayah. Beliau menjelaskan bahwa beliau sering menjadikan mereka sebagai inspirasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertengahan masa jabatan juga ditandai dengan keterlibatannya dalam kegiatan tingkat nasional. Beliau menyebut keikutsertaannya dalam APEKSI sebagai salah satu ruang besar untuk saling bertukar pengalaman antar istri

kepala daerah seluruh Indonesia. Menurutnya, kegiatan *Ladies Program* dalam APEKSI memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbagi tantangan dan solusi yang relevan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Beliau menuturkan:

“kita diberikan kesempatan untuk sharing... ada beberapa dari istri kepala daerah yang menjadi narasumber... berbagi pengalaman sebenarnya.”

Bu Inggit sendiri pernah diundang menjadi narasumber dalam kegiatan APEKSI di Balikpapan, sebuah pengalaman yang beliau sebut sebagai bentuk apresiasi atas keaktifannya dalam menjalankan tugas. Selain APEKSI, bu Inggit juga mengikuti kegiatan JKPI serta rangkaian acara Dekranasda tingkat provinsi dan nasional. Beliau menceritakan keterlibatannya dalam beberapa kegiatan yang menjadikan Kota Pekalongan sebagai ikon di ajang nasional, seperti ketika Pekalongan tampil dalam kegiatan Dekranasda di Makassar dan Banjarmasin. Kesempatan tersebut beliau pandang sebagai peluang berharga untuk memajukan UMKM sekaligus memperkenalkan potensi daerah di forum yang lebih luas.

Di pertengahan masa jabatan ini pula, kepercayaan diri bu Inggit semakin terbentuk seiring dengan berbagai apresiasi yang diterima. Ia menyebut salah satu pencapaian penting yaitu Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023, dimana Kota Pekalongan meraih peringkat Madya. Beliau mengaku tidak pernah berfokus pada penghargaan, melainkan sekadar menjalankan tugas dan program sebaik mungkin. Namun, ketika hasil kerja diapresiasi secara nasional, beliau merasakan dorongan semangat yang lebih besar untuk terus meningkatkan kualitas program:

“Ternyata terlihat sampai kita diakui, diapresiasi, berarti kan terlihat” ujarnya. Meski demikian, beliau menyadari bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibanding mendapatkannya.

3.3.6 Akhir Masa Jabatan

Memasuki akhir masa jabatan periode kedua, dinamika dalam keluarga dan perjalanan bu Inggit sebagai pendamping kepala daerah menunjukkan pergeseran fokus yang semakin jelas. Pada fase ini, diskusi terkait arah politik suaminya masih tetap melibatkan keluarga inti, terutama saudara-saudara kandung suami yang selama ini menjadi lingkaran diskusi terdekat. Sebagaimana beliau jelaskan:

“untuk diskusi itu lebih memang ke kakak-adiknya karena beliau juga sudah tidak punya orang tua”.

Pola pengambilan keputusan ini konsisten sejak awal pencalonan di periode pertama hingga mendekati masa akhir jabatan. Dalam kehidupan keluarga, bu Inggit menggambarkan keseharian yang tetap berjalan seiring padatnya agenda sebagai istri kepala daerah. Ia memiliki tiga anak dengan jenjang pendidikan berbeda. Dua anaknya sedang berkuliah di Yogyakarta, masing-masing mengambil jurusan Hukum dan Ilmu Komunikasi, sementara anak bungsunya yang perempuan masih duduk di bangku SMA. Bu Inggit menegaskan bahwa beliau memberi kebebasan penuh kepada anak-anak dalam memilih bidang studi dan kota tujuan kuliah:

“Untuk jurusannya saya bebaskan sukanya di mana... dan kotanya juga saya bebaskan.”

Hal ini menunjukkan bagaimana beliau tetap memposisikan diri sebagai ibu yang menghargai kemandirian anak-anaknya meski di tengah kesibukan publik. Menjelang tahun terakhir masa jabatan suaminya, bu Inggit juga mencatat perjalanan pernikahan yang telah memasuki lebih dari dua dekade. Beliau mengatakan:

“Kalau menikah saya sudah 21 tahun... mungkin nanti di akhir jabatan bapak anniversary ke-22”.

Refleksi seperti ini menunjukkan bahwa akhir masa jabatan bukan sekadar penutup fase politik, tetapi juga penanda perjalanan panjang keluarga yang tumbuh bersama dinamika jabatan publik. Pada aspek personal, bu Inggit juga terbuka mengenai tantangan menjaga usaha kerajinan yang sudah dijalankan jauh sebelum menjadi istri kepala daerah. Beban pembagian perhatian antara keluarga, kegiatan masyarakat, dan usaha membuatnya sempat berpikir untuk menghentikan usahanya. Beliau mengaku pernah berkata pada suami:

“Gimana kalau saya sementara bubarkan dulu?”

Hal tersebut dikatan bu Inggit karena beliau merasa tidak mampu membagi waktu. Namun suaminya memberikan sudut pandang lain, mengingatkan bahwa menutup usaha berarti memulai dari nol di kemudian hari dan berdampak pada karyawan yang menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut. Suaminya mengatakan:

“Kalau bisa tetap berjalan... walaupun tidak seperti dulu produksinya, yang penting masih ada.”

Nasihat ini kemudian membuat Bu Inggit tetap mempertahankan usaha tersebut meski dengan kapasitas yang lebih terbatas. Fase akhir jabatan juga membawa munculnya dorongan-dorongan dari masyarakat yang berharap suaminya melanjutkan karier politik ke tingkat provinsi atau bahkan mendorong bu Inggit sendiri untuk maju sebagai calon legislatif. Beliau mengungkapkan:

“Ada yang bilang, ‘Setelah bapak, ibu dong yang nyalon’” namun beliau menegaskan bahwa suaminya tidak setuju dan dirinya pun tidak memiliki keinginan ke arah tersebut:

“Untuk saat ini sama sekali belum ada kepikiran ke sana” tegasnya. Meskipun demikian, bu Inggit memahami fenomena semacam itu sebagai bagian dari dinamika politik lokal.

Refleksi yang paling kuat pada akhir masa jabatan muncul dari pengakuannya mengenai pengalaman pribadi. Beliau mengatakan bahwa sejak awal, beliau tidak pernah membayangkan akan menjadi istri kepala daerah:

“Saya sendiri sebenarnya tidak menginginkan ada di posisi ini.”

Namun, beliau memaknai perjalanan tersebut sebagai bentuk amanah besar yang harus ia jalankan dengan sebaik-baiknya:

“Berarti saya diberikan amanah... dan saya harus bisa membuktikan bahwa saya itu mampu.”

Baginya, keberadaan di posisi publik harus menghasilkan manfaat bagi banyak orang. Beliau menutup dengan penegasan:

“Saya sudah diberikan amanah besar... berarti saya harus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.”

3.3.7 Koding Dimensi Pengalaman Politik ibu Inggit Soraya

Koding dari dimensi pengalaman politik ibu Inggit Soraya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Koding / Encoding Hasil Wawancara Ibu Inggit Soraya

Tahap Analisis	Kategori Koding	Bukti Tekstual (Data Transkrip)	Analisis Makna (Encoding/Decoding)
<i>Frameworks of Knowledge</i> (Kerangka Pengetahuan)	Mentalitas Wirausaha (<i>Entrepreneurial Mindset</i>)	"...murni pengusaha. Dan kebetulan juga saya juga... Wirausaha. Kebetulan saya di bidang <i>craft</i> (kerajinan)".	Encoding: Pengetahuan Bu Inggit didominasi oleh pengalaman sebagai pelaku UMKM "Racik Kelir". Kerangka ini membuatnya menyandikan posisi barunya bukan sebagai politisi murni, melainkan sebagai "praktisi" pemberdayaan ekonomi.
	Diskontinuitas Pengetahuan Politik	"...bapak itu sendiri enggak ada <i>basic</i> kayak	Encoding: Ketidadaan latar belakang birokrasi/politik praktis

		politik...". "...karena belum tahu dunia politik... saya tuh agak ragu-ragu dan agak takut".	dalam keluarga inti menciptakan kecemasan awal. Dunia politik di-encode sebagai ruang asing penuh tanggung jawab berat yang awalnya dihindari.
<i>Relations of Production</i> (Hubungan Produksi)	Otoritas Berbasis Dinasti/Keluarga	"...kakak beliau, kakak kandung beliau kan itu pernah menjabat sebagai Wali Kota...". "Kalau tidak ada yang meneruskan dari pihak keluarga, mungkin seperti itu".	Encoding: Produksi awal karier politik suami (Pak Afzan) didorong oleh struktur relasi kekeluargaan (menggantikan posisi almarhum kakaknya), bukan oleh rekrutmen parpol dari bawah.
	Sinergi Institusional & OPD	"...semua jabatan saya itu nempel dengan OPD... PKK kan ada di DPMPPA... Dekranasda juga ada di Dinas Koperasi dan UKM...".	Encoding: Produksi pesan dan program kerja Bu Inggit tidak berdiri sendiri melainkan bertumpu pada struktur birokrasi legal-formal (Organisasi Perangkat Daerah) demi mendukung visi-misi Wali Kota.
<i>Technical Infrastructure</i> (Infrastruktur Teknis)	Ruang Publik Komunal & Media Sosial	"...saya masuk ke pengajian-pengajian ibu-ibu, ke komunitas... ada kegiatan mungkin senam...". "Kita dimudahkan dari media sosial juga... bisa jadi untuk	Encoding: Memanfaatkan infrastruktur kultural akar rumput (pengajian, senam) untuk mentransmisikan pesan politik/sosialisasi. Di sisi lain, menggunakan media sosial sebagai infrastruktur teknis untuk belajar dari istri kepala daerah lain.

		inspirasi...".	
Encoding (Penyandian Pesan)	Penyandian "Amanah Religius- Kebermanfaatan"	"...qadarullah... saya diberikan amanah... Berarti saya harus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang...".	Encoding: Guna mengatasi gejolak batin karena keluar dari zona nyaman bisnis , Bu Inggit menyandikan ulang jabatan publiknya melalui konsep <i>Qadarullah</i> (takdir Allah) dan kewajiban moral untuk memberi kemanfaatan sosial.
	Penyandian "Pembelajar Cepat"	"...ilmu ibaratnya enggak ada di kita belajar di sekolah... lebih ke pengalaman dan jam terbang...".	Encoding: Menyandi citra dirinya sebagai figur yang tangguh dan mau berkembang. Ia memvalidasi kapasitas dirinya melalui pengakuan institusional (menjadi narasumber APEKSI dan penghargaan nasional).
Decoding (Pembacaan/Makna)	Penerimaan Hegemonik (Peneliti)	"Jadi kayak pas, takdir yang sudah ditakdirkan nih". "Ibu jadi belajar dari pengalaman, jadi kayak terjun langsung".	Decoding: Peneliti (Chika) melakukan pembacaan dominan- hegemonik, menyetujui seluruh romantisasi takdir politik Bu Inggit dan memvalidasi keaktifannya tanpa menggali lebih dalam konflik kepentingannya antara bisnis dan jabatan publik.
	Negosiasi Tuntutan Peran (<i>Negotiated Code</i>)	"...di pertengahan kemarin... saya sempat agak mau... Nyerah... tidak bisa membagi waktu...".	Decoding: Terjadi posisi negosiasi dalam diri Bu Inggit. Jiwa wirausahanya menolak membiarkan bisnisnya mengecil , namun egonya dinegosiasikan setelah mendapat

			masukn suami demi menghidupi karyawan dan tuntutan kewajiban mendampingi Wali Kota.
--	--	--	---

Sumber : data primer diolah (2026)